

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
(CBP) DALAM RANGKA KETERSEDIAAN PASOKAN
DAN STABILISASI HARGA (KPSH) DI PERUM
BULOG KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**

Disusun oleh:

Nama	: Fauziatul Ifa
NPM	: 1931020107
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2022



**FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
(CBP) DALAM RANGKA KETERSEDIAAN PASOKAN
DAN STABILISASI HARGA (KPSH) DI PERUM
BULOG KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Terapan

Oleh

Nama

: Fauziatul Ifa

NPM

: 1931020107

Jurusan

: Administrasi Publik

Program Studi

: Administrasi Pembangunan Negara

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2022

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA	:	FAUZIATUL IFA
NPM	:	1931020107
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL	:	FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) DALAM RANGKA KETERSEDIAAN PASOKAN DAN STABILISASI HARGA (KPSH) DI PERUM BULOG KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada, 7 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022

Ketua merangkap Anggota



S. Hamidah

(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

Sekretaris merangkap Anggota

Gati

(Rindri Andewi Gati, S.A.P., M.KP.)

Anggota

SRI RAHAYU

(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fauziatul Ifa
NPM : 1931020107
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Faktor-faktor Dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil **plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 5 Desember 2022

Peneliti



Fauziatul Ifa

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “**Faktor-faktor Dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta**”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini masih mengalami banyak hambatan dan kekurangan yang tidak mungkin dapat dilalui tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan
3. Sekretaris Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan
4. Ketua Tim Pengujii, Sekretaris dan Anggota.
5. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Epi Sulandari, Bapak Eko Pranoto, Bapak Abdillah Luhur N, Ibu Ety Syartika, Bapak Andre Maulana, dan Ibu Laras Kulsum Ramadhian yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staff Politeknik STIA LAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
8. Bapak Muhammad Saifulloh, Bapak Redy Prasetyo, Bapak Erns Saptenno, Bapak Tria Hatmanto dan rekan kerja di Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia

9. Keluarga peneliti yang peneliti cintai, ayah (Jamzuri), Ibu (Siti Maemunah) dan suami tercinta (Luthfi Sabda Sahdana) atas segala dukungan moral dan materil serta doa yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah membantu peneliti selama ini. Mohon maaf bila namanya tidak disebutkan oleh peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penelitian. Peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 5 Desember 2022

Peneliti,



Fauziatul Ifa

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta. Teori yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (Winarno, 2012) ada 4 (empat) aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 6 (enam) orang *key informant* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Kesimpulan penelitian ini bahwa faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaanya, karena masih terdapat kekurangan yaitu: konsistensi penyaluran informasi dalam publikasi melalui media cetak maupun elektronik belum optimal, kurangnya jumlah sumber daya manusia, informasi yang disampaikan masih belum optimal, sulitnya akses data dan informasi, fasilitas anggaran belum efisien, kurangnya komitmen pelaksana eksternal atau pedagang, dan *standar operasional procedure* (SOP) penjualan KPSH belum optimal. Saran penelitian ini yaitu; diperlukan rutinitas publikasi, diperlukan rotasi sumber daya manusia, memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik, data dan informasi yang dimiliki harus mudah diakses dengan menganut SPBE, perlu pengkajian mekanisme penggantian anggaran, perlu pengawasan penyaluran dan perlu perbaikan *standar operasional procedure* (SOP).

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)

ABSTRACT

This research aims to identify, describe and analyze the factors on implementation of Government Rice Stock (CBP) Policy by Perum BULOG DKI Jakarta Regional Office to Supply Availability and Price Stabilization programme (KPSH). The theory used is the policy implementation model developed by George C. Edwards III, there are four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The techniques used for data collection are: interviews, observation, and documentation studies. This research used structured interviews conducted with six key informants who had direct knowledge and involvement. The conclusion of this study is that the implementation of the policy is viewed from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that the policy has not run optimally in its implementation, because there are still deficiencies, namely: the consistency of distributing information in publications through print and electronic media is not optimal, the number of human resources is lacking, the information conveyed is still not optimal, the difficulty of accessing data and information, budget facilities are not efficient yet, the lack of commitment from external implementers or traders, and standard operating procedures KPSH sales are not optimal. Suggestions for this research are; publication routines are required, rotation of human resources is required, expanding the reach of information dissemination through various print and electronic media, data and information owned must be easily accessible by adhering to SPBE, it is necessary to study the mechanism for budget reimbursement, it is necessary to monitor distribution and it is necessary to improve the standard operating procedure (SOP).

Keyword: Policy Implementation, Government Rice Stock (CBP) Policy, Supply Availability and Price Stabilization Programme (KPSH)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Kebijakan.....	5
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah	5
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.....	5
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.....	6
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Kedarsediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.....	7

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.....	8
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana.....	9
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan.....	12
C. Konsep Kunci.....	20
D. Kerangka Berpikir.....	21
METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Metode Penelitian	23
B. Teknik Pengumpulan Data.....	23
C. Instrumen Penelitian	25
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	25
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN.....	28
A. Penyajian Data.....	28
1. Gambaran Umum Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta	28
2. Struktur Organisasi Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta	29
3. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran KPSH Beras Medium.....	33
4. Alur Pra Pengajuan Pembelian Beras KPSH di Pasar Induk Beras Cipinang.....	36
5. Data Stok Berdasarkan Usia Simpan di Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta	37
6. Data Penyaluran KPSH Tahun 2022 di Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta	37
7. Harga Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Tahun 2022.....	38
B. Pembahasan	39
1. Aspek Komunikasi	40
2. Aspek Sumberdaya	45

3. Aspek Disposisi.....	52
4. Aspek Struktur Birokrasi	55
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	62
1. Aspek Komunikasi.....	62
2. Aspek Sumberdaya	63
3. Aspek Disposisi.....	64
4. Aspek Struktur Birokrasi	64
BAB V.....	66
PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara	
2. Pedoman Studi Dokumen	
3. Transkrip Wawancara	
4. Hasil Studi Dokumen	
5. Surat Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta	
6. Surat Ijin Penelitian dari Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten	
7. Riwayat Hidup Peneliti	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 <i>Key Informant</i> Penelitian.....	24
Tabel 4. 1 Data Stok Beras Berdasarkan Usia Simpan (satuan kg).....	37
Tabel 4. 2 Data Penyaluran KPSH Tahun 2022 (satuan kg).....	38
Tabel 4. 3 Perkembangan Harga Rata-rata Beras Grosir di PIBC Tahun 2022....	38
Tabel 4. 4 Harga Eceran Tertinggi Beras.....	48
Tabel 4. 5 Matriks Hasil Penelitian	57

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Berpikir	21
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta .	30
Gambar 4. 2 Alur Pengajuan Pembelian Beras KPSH di PIBC.....	36



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR SINGKATAN

CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
HET	: Harga Eceran Tertinggi
HPB	: Harga Pembelian
Kanwil	: Kantor Wilayah
KPA BUN	: Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
KPSH	: Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
Perum	: Perusahaan Umum
PPA BUN	: Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SOP	: Standard Operating Procedures (SOP)

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kesuksesan proses pembangunan bergantung pada proses administrasinya. Pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan saling melengkapi. Rencana pembangunan nasional merupakan aspek administrasi pembangunan sebagai kewajiban pihak eksekutif untuk merealisasikannya. Salah satu arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam rangka memperkuat ketahanan pangan adalah peningkatan ketersediaan pangan dapat dipenuhi melalui, antara lain: produksi pangan dalam negeri, penguatan stok/cadangan pangan dalam negeri dan dipenuhi dari impor.

Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebutuhan utama manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, negara berkewajiban mewujudkan keterjangkauan, ketersediaan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, aman, dan bergizi seimbang, secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan budaya lokal, sumber daya, dan kelembagaan.

Berdasarkan neraca pangan komoditas beras tahun 2022, ketersediaan beras secara nasional sebesar 37.346.582 ton dengan stok awal tahun 2022 sebesar 5.272.537 ton dan produksi dalam negeri sebesar 32.074.045 ton (BPS, Kementerian Inatrade Kemendag dan SINAS-NK Kemenko Perekonomian, per 22 Oktober 2022). Sesuai data susenas BPS bahwa trend konsumsi beras dalam rumah tangga secara nasional mengalami penurunan selama periode 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, konsumsi beras nasional adalah sebesar 100.57 kg/kap/tahun, bertumbuh sebesar 2.26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah tahun 2016 hingga 2020, konsumsi beras mengalami pertumbuhan negatif dengan penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -2.91 persen atau

97.64 kg/kap/tahun. Meskipun tren konsumsi beras perkapita masyarakat Indonesia telah menurun, namun konsumsi beras per kapita Indonesia masih lebih tinggi daripada tingkat konsumsi negara lain di ASEAN yang juga merupakan konsumen beras. Malaysia merupakan negara yang penduduknya mengonsumsi beras, namun konsumsinya hanya berkisar 81 kg/kapita/tahun lebih rendah dari jumlah konsumsi per kapita Indonesia (OECD-FAO 2018).

Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Pemerintah mengelola dan menguasai cadangan pangan pemerintah yang merupakan cadangan pangan nasional. Saat ini cadangan pangan pemerintah lebih banyak berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan harga yang stabil dan jumlah yang cukup. Kebijakan pengelolaan CBP diatur melalui sejumlah regulasi antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, pemerintah memberikan penugasan untuk mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) melalui Perum BULOG. Perum BULOG menyerap hasil produksi dalam negeri

untuk kemudian disimpan dalam bentuk CBP yang berfungsi sebagai cadangan pemerintah dan digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga, penanggulangan kondisi terkait bencana alam, dan kerjasama serta bantuan internasional.

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang berstatus ibukota sehingga menjadi barometer harga pangan dan bukan merupakan daerah produsen beras sehingga ketersediaan beras menjadi faktor penting bagi pemerintah. Memperhatikan perkembangan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 31 Agustus 2022 tercatat harga beras medium khususnya di daerah DKI Jakarta masih diatas HET. Perkembangan harga ini menjadi penting untuk dianalisis pada Perum BULOG DKI Jakarta khususnya mempertimbangkan tingginya penyaluran stok CBP untuk KPSH pada periode Juli-Agustus 2022. Permasalahan yang dihadapi di Perum BULOG DKI Jakarta terkait dengan publikasi informasi Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang belum optimal, penganggaran masih menggunakan modal yang terbatas dari pinjaman dengan suku bunga komersial, menggunakan ketersediaan sumberdaya terbatas, dan terjadinya kerentanan dalam penggunaan SOP yang baru.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor dalam implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menambah wawasan dalam kebijakan publik khususnya terkait faktor-faktor dalam implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembuat dan pelaksana kebijakan di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta terkait implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta.

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**